

Pendidikan -

Pemberdayaan masyarakat melalui program Keaksaraan Fungsional
(Jakarta, Harian Terbit, 31 Juli 2008).

LELAKI setengah baya itu tidak lagi terlihat kebingungan ketika petugas dari kelurahan memintanya mengisi formulir untuk keperluan kegiatan pelatihan keterampilan yang akan diikutinya. Sebab, sejak ia rajin mengikuti program Keaksaraan Fungsional yang dimotori sejumlah mahasiswa di desanya mulai empat bulan lalu, kini lelaki berkulit hitam legam itu tak perlu lagi meminta anak atau tetangganya yang masih pelajar SMP untuk mengisi formulir tersebut. Lelaki bernama Sunardi yang saat ini tinggal di Desa Jembayat, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, itu telah mampu mengisi sendiri formulir kegiatan pelatihan keterampilan itu karena ia saat ini telah bisa membaca, menulis, dan berhitung.

Bahkan, sejak ia semakin terampil membaca, menulis, dan berhitung, usaha pembuatan tahu dan tempe yang dikelola bersama istrinya semakin berkembang. Hal itu memungkinkan terjadi karena pada saat Sunardi belajar membaca, menulis, dan berhitung melalui program Keaksaraan Fungsional, oleh para tutornya ia juga dilatih berbagai keterampilan, antara lain bagaimana membuat tempe dan tahu yang baik serta bagaimana cara memasarkannya. Selain itu, bapak berputra dua itu juga semakin rajin mengikuti berbagai pelatihan keterampilan baik yang diadakan oleh kelurahan maupun pihak lain, sehingga kemampuannya dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya semakin komplit.

Tak heran, di samping usaha pembuatan tahu dan tempe yang dibangun bersama istrinya itu semakin maju, ia juga kini telah mampu melakukan diversifikasi usaha. Sebab, saat ini tahu dan tempe yang diproduksinya tidak lagi hanya dijual kepada masyarakat dalam bentuk produk mentah, tetapi telah pula dipasarkan dalam bentuk produk makanan olahan berupa kripik tahu dan kripik tempe . Semua itu bisa ia lakukan berkat sejumlah pelatihan keterampilan yang diikutinya, terutama melalui program Keaksaraan Fungsional, serta dari upaya optimalisasi membaca buku-buku keterampilan yang diperolehnya dari perpustakaan keliling 'Mobil Pintar'. Dengan semakin berkembang usahanya itu, kini Sunardi bukan hanya telah muncul menjadi pengusaha kecil yang sukses tetapi juga merupakan satu-satunya orang di desanya yang berhasil membuka lapangan kerja bagi warga sekitarnya..

Dari ilustrasi yang menggambarkan suksesnya seorang peserta program Keaksaraan Fungsional dalam memberdayakan diri dan masyarakat sekitarnya, terlihat jelas bahwa program Keaksaraan Fungsional yang digagas Departemen Pendidikan Nasional itu jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan sejumlah program pemberantasan buta aksara lainnya yang dikembangkan institusi itu selama ini. Sebab, melalui program yang cukup komprehensif tersebut jumlah masyarakat yang belum melek huruf tidak saja dapat dikurangi, tetapi juga dapat diberdayakan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kenyataan seperti itu sangat mungkin dapat direalisasikan secara baik, karena dalam program Keaksaraan Fungsional ada banyak hal yang bisa diberikan oleh para tutor kepada

warga belajar. Mereka bukan hanya diajari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga berbagai keterampilan hidup [life skill] yang diharapkan mampu membuka pikiran mereka secara terarah agar warga belajar itu mampu berkembang secara optimal dan dapat hidup lebih baik. Sebab, dalam program Keaksaraan Fungsional tersebut kegiatan pembelajaran tidak difokuskan pada pengembangan kognitif warga belajar, melainkan juga pada upaya optimalisasi kemampuan psikomotor dan afektifnya. Dengan demikian, setiap warga belajar setelah selesai mengikuti program pembelajaran dari para tutor, diharapkan mampu memberdayakan diri secara maksimal dengan berbagai keterampilan hidup yang telah diperolehnya. Melalui pemberdayaan diri inilah diyakini mereka dapat berkembang lebih maju sehingga kualitas hidupnya dapat meningkat secara signifikan, terutama dari aspek ekonomi.

Untuk semua Sesuai hasil penelitian UNESCO yang tertuang dalam rencana aksi nasional pendidikan keaksaraan dan pemberantasan buta aksara terungkap bahwa pendidikan keaksaraan mampu memberdayakan masyarakat. Di samping itu pendidikan keaksaraan juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan program pembangunan, meningkatkan derajat kesehatan dan gizi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Bertolak dari hal tersebut, maka sudah saatnya apabila berbagai pihak mendukung program Education For All (EFA) atau Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang diusung Departemen Pendidikan Nasional bersama pihak lain yang terkait. Program EFA atau PUS itu merupakan gerakan masyarakat dunia yang bertujuan untuk memberantas buta aksara yang didasarkan pada Kerangka Dasar Dakkar 2000, yang berisi hasil komitmen negara-negara di dunia untuk mewujudkan upaya pemberantasan buta huruf secara optimal.

Berdasarkan komitmen Dakkar itu, tentu tidaklah salah jika kegiatan sosialisasi dan realisasi dari program EFA atau PUS sudah sejak lama mendapat perhatian besar dari Departemen Pendidikan Nasional [Depdiknas]. Langkah itu ditempuh karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2005, jumlah masyarakat yang buta aksara di Indonesia masih sekitar 12 juta jiwa. Mereka yang masih buta aksara itu umumnya adalah kaum perempuan yang tinggal di berbagai pelosok tanah air yang kebanyakan merupakan kelompok masyarakat marjinal.

Untuk membantu mereka bisa melek huruf tentu dibutuhkan program-program khusus yang praktis dan efektif. Untuk itu Depdiknas sudah sejak lama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga [Diklusepora] yang saat sekarang berubah menjadi Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal [PNFI] mengembangkan sejumlah program pemberantasan buta huruf di antaranya berupa Kejar [Kelompok Belajar] Paket A dan program Keaksaraan Fungsional.

Sebelum program Keaksaraan Fungsional dikembangkan oleh Depdiknas, program Kejar Paket A memang telah menjadi tumpuan utama bagi institusi itu dalam usaha menekan jumlah penduduk yang masih buta aksara. Namun demikian, meski kegiatan sosialisasi program Kejar Paket A itu begitu gencar dilakukan selama ini, namun hasil

pemberantasan buta huruf yang diperoleh melalui program tersebut ternyata tidaklah maksimal. Hal itu terjadi, karena upaya pemberantasan buta huruf melalui Kejar Paket A cenderung lebih menekankan pada kemampuan warga belajar dalam membaca, menulis, dan berhitung saja, padahal banyak di antara masyarakat yang menjadi peserta Kejar Paket A yang telah berkeluarga.

Fungsional Mereka umumnya tidak hanya membutuhkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga berbagai keterampilan yang memungkinkan mereka memperoleh kemudahan dalam mencari pendapatan guna memenuhi segala kebutuhan keluarga. Untuk itu, pola pemberantasan buta huruf melalui program Kejar Paket A yang murni hanya mengajari warga belajar untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung, jelas sudah tidak relevan lagi dikembangkan oleh Depdiknas. Sebab, jika warga belajar yang mengikuti Kejar Paket A tidak merasakan manfaat apa-apa dari kemampuannya membaca, menulis, dan berhitung bagi upaya peningkatan kehidupannya, tentu lambat-laun mereka menjadi tidak tertarik lagi untuk mengikuti program tersebut sehingga pada akhirnya mereka akan kembali menjadi buta aksara. Akibatnya, program pemberantasan buta aksara yang membutuhkan dana cukup besar itu pun menjadi sia-sia karena hasilnya tidak signifikan dengan dana, tenaga, dan waktu yang telah dikeluarkan oleh Depdiknas dan pihak lain yang mendukungnya.

Beranjak dari persoalan seperti itu, jelaslah langkah Depdiknas mengembangkan program Keaksaraan Fungsional dalam upaya memberantas buta aksara di Indonesia pada saat sekarang sangatlah tepat. Apalagi menurut pandangan Umberto Sihombing (1999), program Keaksaraan Fungsional merupakan pengembangan program pemberantasan buta aksara yang bertujuan meningkatkan keaksaraan dasar masyarakat yang buta aksara sesuai dengan minat dan kebutuhan hidupnya. Artinya, dalam program tersebut semua warga belajar selain dituntut memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai kemampuan dasar, juga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pemberian pelatihan berbagai keterampilan hidup yang diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupannya secara ekonomis.

Berkaitan dengan hal itu, Depdiknas memberi definisi program Keaksaraan Fungsional sebagai program pengembangan kemampuan seseorang dalam mengamati dan menganalisis, yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada pada diri warga belajar dan lingkungannya. Konsep Depdiknas tersebut jika dicermati ternyata sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 26 Ayat (3) yang berbunyi, "Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik."

Memang, jika dipahami secara harfiah program Keaksaraan Fungsional merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu 'keaksaraan' dan 'fungsional'. Keaksaraan dari sejumlah literatur diartikan bukan hanya sebagai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, melainkan juga kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan

yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Sementara itu makna fungsional dalam keaksaraan secara harfiah bisa diartikan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga belajar dan masyarakat. Dengan demikian, Keaksaraan Fungsional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga belajar dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan, serta memberi manfaat bagi upaya meningkatkan kualitas hidupnya.

Berdasarkan definisi di atas, maka jelaslah bahwa upaya pemberantasan buta aksara di tanah air akan lebih efektif jika dikembangkan melalui program Keaksaraan Fungsional. Sebab, melalui program tersebut warga belajar tidak hanya disiapkan untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung serta mampu beradaptasi dengan perkembangan hidup yang semakin maju, tetapi juga dituntut mampu memberdayakan diri dan lingkungannya guna mendukung upaya peningkatan taraf hidupnya. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Depdiknas sudah semestinya jika memperhatikan secara serius kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan program Keaksaraan Fungsional.

Misalnya, untuk bisa memberikan pelatihan berbagai keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan warga belajar dalam program Keaksaraan Fungsional, tentu diperlukan tutor-tutor yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Berkaitan dengan hal itu, langkah Depdiknas yang membentuk Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan melalui Permendiknas Nomor 8 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tentu sangat tepat.

Hal itu disebabkan direktorat ini secara khusus diberi tugas untuk membina dan mengoordinasikan berbagai upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan non formal, termasuk untuk program Keaksaraan Fungsional.

Persoalan lain yang harus diperhatikan Depdiknas adalah waktu pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional. Hal ini perlu diperhatikan agar pengembangan program Keaksaraan Fungsional memperoleh hasil yang maksimal, karena warga belajar Keaksaraan Fungsional rata-rata adalah masyarakat produktif yang mempunyai kesibukan yang tidak bisa begitu saja dapat ditinggalkan hanya untuk mengikuti kegiatan belajar. Untuk itu, Depdiknas dan pihak lain yang terlibat dalam program tersebut dapat merumuskan program Keaksaraan Fungsional yang pelaksanaannya sangat fleksibel dan program-programnya tidak memberatkan warga belajar. (Penulis adalah staf pengajar Al-Azhar 10 Kembangan Jakarta)

Oleh Mustopa